

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *e-government* untuk mengukur kesenjangan digital telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian kesenjangan digital di lingkungan pemerintahan daerah juga dilakukan oleh Chalita Srinuan (2012) melakukan penelitian pengukuran antar kelompok masyarakat dan antar negara-negara di Thailand. Model yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *econometric* untuk mengukur kesenjangan digital di Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor permintaan yang biasanya ditemukan di Amerika Serikat dan Uni Eropa terlihat juga di Thailand. Kesenjangan digital di Thailand dibentuk oleh interaksi antara faktor dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Kedua faktor tersebut diperlukan untuk mempromosikan keuntungan dalam pengadopsian internet dan untuk menjembatani kesenjangan digital (Srinuan, 2012).

Selain menggunakan metode *econometric*, pengukuran kesenjangan digital dapat dilakukan menggunakan metode yang digunakan pada masyarakat Eropa yaitu SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking The Information Society*). Penelitian yang menggunakan model SIBIS antara lain dilakukan oleh Alivia Yulfitri (2008). Penelitian ini mengambil obyek dunia pendidikan dengan studi kasus di SMU Negeri Kotamadya di Bandung. Penelitian ini dilakukan terhadap guru-guru di sekolah tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel ketersediaan fasilitas akses TIK dengan pencapaian penguasaan

TIK, ketersediaan fasilitas akses TIK dengan tingkat penguasaan TIK, serta ketersediaan fasilitas akses TIK dengan pemanfaatan TIK (Yulfitri, 2008).

Metode SIBIS juga dipakai pada penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah (2013) di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode SIBIS GPS (*General Population Survey*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan akses TIK berada pada kategori tinggi dan kesenjangan kemampuan TIK berada pada kategori sedang, sementara kondisi kesenjangan digital berdasarkan faktor kelompok usia, penghasilan, pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kesenjangan digital antar SDM, sementara jenis kelamin tidak cukup signifikan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesenjangan digital (Hidayatullah, 2013).

Penelitian tentang kesenjangan digital masyarakat di kota juga dilakukan oleh Dyah Listianing Tyas (2015). Penelitian ini dilakukan di masyarakat kota Pekalongan dengan menggunakan metode SIBIS GPS dalam mengurangi kesenjangan digital. Hasil pengukuran kesenjangan tingkat kesenjangan digital dilihat dari. Aspek perilaku penggunaan internet, kegunaan penggunaan internet, *e-government* dan demografi menjadi evaluasi bagi pembuat keputusan dalam membuat upaya dalam pemerataan penguasaan TIK agar kesenjangan digital dapat diminimalisir dengan menyusun strategi dalam mengurangi kesenjangan digital (Tyas, 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penulis menganggap bahwa metode SIBIS merupakan metode yang paling tepat untuk mengukur kesenjangan digital

pada masyarakat dengan menggunakan indikator-indikator yang terdapat didalamnya. Hasil studi literatur pada penelitian terdahulu belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang pengukuran kesenjangan digital masyarakat di Kota Kupang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital merupakan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan TIK dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya (Hargittai, 2003; Dewan dkk, 2005). Menurut OECD tahun 2001 (1), kesenjangan penguasaan teknologi informasi (*digital divides*) didefinisikan sebagai berikut : *"....the gap between individuals, households, businesses and geographic areas at different socio-economic levels with regard both to their opportunities to access information and communication technologies (ITs) and to their use of the Internet for a wide variety of activities"*.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan bukan hanya terjadi di tingkat bisnis, sosial ekonomi, rumah tangga, dan geografi saja, tetapi juga mencakup kesenjangan di tingkat individu. Perbedaan target sasaran pengukuran tentunya memerlukan alat ukur yang sesuai dengan keperluannya. Berdasarkan kesempatan untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Zulkarimen & nasution (2007), kesenjangan digital merupakan keadaan dimana terjadi gap antara mereka yang dapat mengakses internet melalui

infrastruktur teknologi informasi dengan mereka yang sama sekali tidak terjangkau oleh teknologi tersebut. Sementara menurut Donny (2012), istilah kesenjangan digital terbentuk untuk menggambarkan kesenjangan dalam memahami, kemampuan, dan akses teknologi, sehingga muncul istilah “mempunyai” sebagai pemilik atau pengguna teknologi dan “tidak mempunyai” yang berarti sebaliknya (Donny,2012).

Pengertian kesenjangan digital menurut Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e – government* didefinisikan sebagai keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Selain itu juga disebutkan bahwa ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang kesenjangan digital yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi (Inpres, 2003).

Demikian kesenjangan digital diartikan kesenjangan (gap) antara individu, rumah tangga, bisnis, (atau kelompok masyarakat) dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penggunaan internet untuk beragam aktivitas. Di Indonesia banyak dijumpai kesenjangan digital di lingkup pemerintahan mengenai implementasi *e – government*, sehingga dapat memperlambat tujuan dalam penerapan *e-government*.

2.2.2 Konsep Kesenjangan Digital

2.2.2.1 SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*)

SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking The Information Society*) adalah suatu proyek yang dilakukan oleh komisi Eropa dalam menganalisa dan membandingkan indikator-indikator yang berbeda (SIBIS, 2003). Tujuan dari SIBIS ini lebih difokuskan pada kesiapan internet, kesenjangan digital dan keamanan digital.

Indikator-indikator yang ada pada SIBIS telah dilakukan pengujian dan dilakukan survey perbandingan di 15 negara bagian yakni Amerika Serikat, Swiss dan EU *Accesion country*, Bulgaria serta Negara bagian lainnya. Tujuan dari survey penelitian tersebut adalah untuk membandingkan antara Negara-negara Eropa dan untuk pertama kalinya digunakan indikator-indikator yang sama antara Negara Eropa dan Amerika Serikat secara bersamaan (SIBIS, 2003).

Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan Metode SIBIS	
Metode SIBIS	
Kelebihan	Kekurangan
Banyak Variabel yang dapat dipilih antara lain : <ol style="list-style-type: none">1. Kesiapan internet;2. Kesenjangan digital;3. Keamanan informasi;4. Tanggapan secepat mungkin terhadap akses;5. Literasi, pembelajaran serta pelatihan digital;6. <i>E-Commerce, E-Work, E-Government, E-Health.</i>	Indikator kesenjangan digital yang kurang menekan pada kesenjangan sosial dan ekonomi. (sumber : (Barzilai-Nahon,2006))

Sumber : SIBIS, 2003

Indikator SIBIS yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesenjangan digital masyarakat di Kota Kupang adalah perilaku penggunaan internet, kegunaan pengguna internet, *e-government* dan *demographic* (SIBIS, 2003).

a. Perilaku Penggunaan Internet

Dalam penelitian perilaku penggunaan internet menunjukkan bahwa internet membuat hidup menjadi mudah, dapat berkomunikasi dengan berbagai masyarakat yang berbeda budaya dan pendidikan (Aydin, 2007) (D'Esposito, 1999). Pada penelitian lainnya juga menjelaskan bahwa internet membuat hidup lebih mudah dalam mencari tujuan ilmiah, mencari tempat, pembelian produk, komunikasi lewat *email* atau *chatting* dan sebagai media hiburan (Fallows, 2004).

b. Kegunaan penggunaan Internet

Kegunaan internet menjadi sangat bermanfaat oleh pengguna dalam melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut lebih mudah, bermanfaat, menambah produktifitas, mempertinggi efektifitas (Chin, 1995).

c. *E-goverment*

Pemanfaatan *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan menurut Keppres no. 20 Tahun 2003 (Inpres, 2003).

d. *Demographic*

Defenisi dari demografi dapat diartikan sebagai penebaran, territorial dan komposisi penduduk dalam perubahana serta sebab-sebab perubahan dan perubahaan timbul karena adanya migrasi dan perubahan status (Philip M. Hauser, 1959).

